

KEGIATAN DPR-RI

MINGGU KETIGA SEPTEMBER 2012

Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi minggu ketiga September 2012 ini, memuat berbagai kegiatan Rapat Paripurna tanggal 11 September 2012 dan kegiatan Rapat-Rapat Komisi di dalam membahas Rencana Kerja Anggaran K/L dalam kaitan dengan pembagasan RUU APBN 2013. Berikut ringkasannya:

Rapat Paripurna tanggal 11 September 2012

Rapat Paripurna pada tanggal 11 September memiliki agenda yaitu [1] Laporan BAKN DPR-RI Mengenai Hasil Telaahan BAKN tahun 2012; [2] Laporan Baleg DPR-RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan DPR-RI yaitu Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan tentang Tata Cara penarikan RUU. [3] Pendapat Fraksi-Fraksi dan pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI yaitu RUU tentang Tabungan Perubahan Rakyat dan tentang Perjanjian Internasional. Dan [4] Pembentukan Pansus RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Laporan BAKN DPR-RI mengenai Hasil Telaahan BAKN tahun 2012 yang disampaikan oleh Ketua BAKN intinya adalah sebagai berikut: [1] kegiatan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK selama masa sidang ini, telah dilakukan oleh BAKN antara lain meliputi penelaahan atas HAPSEM I tahun 2011, HAPSEM II tahun 2011, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dan Laporan keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP 2011. Hasil penelaahan telah secara resmi disampaikan oleh BAKN kepada Pimpinan DPR dan Komisi-Komisi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. [2] Pokok-pokok hasil penelaahan BAKN terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang telah dilakukan BPK menjadi perhatian bersama karena berdasarkan hasil telaahan disimpulkan ada indikasi korupsi dan merugikan keuangan negara. Disamping itu, beberapa bagian yang dilaporkan juga telah menjadi isu publik di berbagai media massa. Antara lain, Laporan Hasil Penelaahan terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam pengelolaan APBN dan APBD tahun anggaran 2010; laporan hasil telaahan

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie



terhadap pengadaan barang dan jasa, PNPB dan rekening terkait di Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010; laporan hasil telaahan terhadap pengadaan sarana dan prasarana pembuatan Vaksin Flu Burung untuk manusia pada Dirjen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan kementerian kesehatan tahun anggaran 2008-2011.

[3] akibat dari permasalahan tersebut, telah menimbulkan: hilangnya potensi penerimaan pajak sebesar Rp. 368,70 milyar (uji petik di beberapa kementerian); indikasi kerugian negara pada 16 universitas di lingkungan kementerian pendidikan nasional sebesar Rp. 309,77 milyar; kerugian negara pada pengadaan sarana dan

prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada kementerian kesehatan sebesar Rp. 468,98 milyar. Melalui pimpinan DPR dan Rapat paripurna, ketua BAKN meminta bahwa dari pokok-pokok hasil telaahan BAKN DPR-RI atas pengadaan sarana dan prasarana pembuatan Vaksin Flu Burung untuk manusia pada Ditjend Penganadilan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan TA 2008-2011 dapat **diputuskan** untuk diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan pasal 41 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar + Rp. 468,98 milyar.

Agenda **Laporan Baleg DPR-RI terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan DPR-RI**, telah mendapat persetujuan Rapat paripurna. Tata Cara mempersiapkan RUU terdiri dari 4 bab dan 49 pasal. Dalam salah satu pasal dalam bagian I mengatur mengenai: setiap RUU harus disertai dengan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan dengan berpedoman pada teknik penyusunan naskah akademik. Penyusunan ini dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI**: Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Rizka Arinindya; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNG JAWAB FOTO**: Eka Hindra; **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

dan studi lapangan. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa RUU yang berasal dari DPR dapat disusun oleh anggota, komisi, gabungan komisi, badan legislasi, atau DPD. Untuk penyusunan RUU sebagaimana disebutkan, anggota dapat meminta bantuan Sistem Pendukung Legislasi. Dalam pasal 15, antara lain diatur bahwa untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan RUU oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Legislasi dapat melakukan: penyebaran RUU melalui media cetak/atau elektronik; rapat dengar pendapat umum; kunjungan ke daerah atau kunjungan ke luar negeri. Kunjungan ke luar negeri dilakukan dengan persetujuan pimpinan DPR melalui proses yang diatur secara jelas: usulan kunjungan luar negeri memuat alasan, urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan dengan negara tujuan dengan materi RUU. Penyusunan RUU oleh DPD terkait dengan: otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Tata Cara penarikan RUU yang diajukan oleh Baleg memuat 4 bab dan 30 pasal, antara lain: [1] RUU, baik yang berasal dari DPR atau presiden, dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasan. RUU yang ditarik, merupakan RUU yang diajukan oleh anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Baleg atau DPD selaku pengusul, dan RUU yang berasal dari Presiden. Penarikan RUU dilakukan dengan alasan perbaikan materi RUU oleh pengusul, perbaikan materi RUU yang berasal dari Presiden, melampaui batas waktu pembahasan setelah diberi waktu perpanjangan, dan atau tidak terjadinya kesepakatan terhadap suatu materi dalam pembahasan RUU setelah melalui dua kali masa sidang. Dalam bab-bab berikutnya, diatur secara rinci, tata cara penarikan RUU, baik sebelum menjadi usul DPR, atau penarikan dapat dilakukan setelah RUU disampaikan DPR kepada Presiden. RUU yang datang dari DPD dapat ditarik kembali sebelum disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Baleg untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU. Penarikan RUU yang datang dari Presiden dapat dilakukan sebelum memasuki

pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pendapat Fraksi-Fraksi dan pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI yaitu RUU tentang Tabungan Perubahan Rakyat dan tentang Perjanjian Internasional, menyetujui menjadi RUU DPR dan akan diproses sesuai dengan mekanisme prosedur tata tertib. Penanganannya akan diputuskan oleh Bamus, setelah proses penunjukan Menteri yang akan menangani RUU, oleh Presiden.

Agenda **Pembentukan pansus RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**, disetujui oleh Rapat paripurna.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pada tanggal 12 September, dipimpin oleh Ir. H. Pramono Anung, Tim Pengawas Century, telah mengundang Sdr. Antasari Azhar (Mantan Ketua KPK), dalam acara meminta penjelasan terkait kasus Bank Century. Pada rapat tersebut, Antasari Azhar telah menyampaikan beberapa hal: [1] Ketua KPK (Antasari Azhar) pada saat itu, diundang di Istana Negara tanggal 9 Oktober 2008, dalam rangka koordinasi dan sinergi untuk mengawal pelaksanaan kebijakan penyelamatan perekonomian negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai antisipasi dalam menghadapi kemungkinan krisis global. Secara eksplisit, dalam pertemuan tersebut, tidak pernah dibicarakan *bank out* Bank Century, tetapi semata-mata membicarakan upaya mengatasi krisis ekonomi dan untuk itu, diperlukan langkah-langkah kongkrit, sekalipun belum ada aturannya. [2] Rencana penyelamatan Bank Indover disampaikan Bapak Boediono selaku Gubernur BI kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang tidak menyetujui penyelamatan Bank Indover tersebut, namun Antasari Azhar tidak diberitahu rencana penyelamatan Bank Century. [3] kebijakan untuk kepentingan rakyat atau kepentingan umum tidak dapat dipidana. [4] KPK akan bertindak, jika ada oknum yang menyalahgunakan atau menyimpang kebijakan. [5] mantan Ketua KPK Antasari Azhar tidak diberi informasi mengenai Perpu No. 4 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.



Wakil Ketua Priyo Budi Santoso saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI



Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI

Setelah penjelasan tersebut Anggota Tim Century menyampaikan beberapa pertanyaan.

Kesimpulan dari rapat tersebut adalah: [1] menyetujui untuk mengundang Sdr. Jusuf Kalla pada hari Rabu 19 September 2012 pukul 09.00 dan pada pukul 11.00 dilanjutkan RDP dengan KPK. Mengenai usul akan mengundang Sdr. Susno Duadji dalam Rapat Tim Pengawas, agar dibicarakan kembali di dalam Tim Kecil Pengawas Century. [2] menyetujui untuk meminta rekaman pertemuan terbatas antara Presiden RI dengan sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana Negara pada 9 Oktober 2008, kepada Presiden. [3] sebagai catatan: RDP antara Tim Pengawas Century dengan mantan Ketua KPK Antasari Azrah, untuk meminta penjelasan/keterangan mengenai kasus Bank Century, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas Tim Pengawas Century untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekomendasi DPR-RI dalam Rapat paripurna tanggal 3 Maret 2010 terkait kasus Bank Century.

SIDANG UMUM AIPA Ke 33

Pelaksanaan Sidang Umum AIPA di Lombok NTB tanggal 16-22 September 2012 memiliki beberapa agenda: pertemuan anggota perempuan parlemen anggota-anggota AIPA (*Woman Parliamentarian of AIPA*), yang akan berlangsung pada hari Senin tanggal 17 September 2012 pukul 09.00- 12.00. Pertemuan ini dibuka oleh Dr. Marzuki Alie selaku Presiden AIPA. Pada malam hari, 19.00-20.00 akan dilaksanakan *Opening Ceremony* dengan acara pokok yaitu Pidato Dr. Marzuki Alie sebagai Presiden AIPA/Ketua DPR RI, Sambutan dari Chairman ASEAN/PM Kamboja Hun Sen, dan sambutan pembukaan oleh Prof. Dr. Boediono (Wakil Presiden RI).

Hari Selasa (18 September 2012), pagi hari, acaranya adalah *courtesy call* Ketua-Ketua Delegasi AIPA dan Ketua Delegasi Observer, serta tamu kehormatan Tuan Rumah kepada Presiden AIPA Dr. Marzuki Alie. Pada jam 09.00-16.30, diacarakan Paripurna Pertama Sidang Umum AIPA, yang antara lain akan menetapkan program aktifitas dan agenda item untuk Sidang Umum AIPA, pembentukan komisi-komisi, dan *statements* dari Ketua-Ketua Delegasi



Suasana rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas Century DPR

AIPA dan Ketua Delegasi Observer.

Pada hari Rabu, 19 September, dilakukan *Committee Meeting* (paralel), yaitu *committee on political matters, economic matters, social matters, dan organizational matters*. Sore hari, dari jam 14.00 sampai 17.45, diadakan acara dialog dengan *observer delegation* (paralel) yaitu Australia, Belarus, Canada, People Republic of China, European Parliament, India, Jepang, Republic of Korea, dan Russian Federation. Malam hari, *meeting of committee on Joint Communiqué*.

Pada Kamis, 20 September, diacarakan untuk program wisata untuk delegasi (*day cruise program*).

Jumat, 21 September, sidang pleno kedua, yang beragendakan; laporan dari seluruh committee; pengumuman hari, waktu dan tempat Sidang Umum 34 AIPA; penandatanganan *Joint Communiqué* oleh ketua-ketua delegasi; transfer of office of the president of AIPA; acceptance speech oleh tuan rumah sidang AIPA ke-34; dan *closing speech* oleh Dr. Marzuki Alie sebagai Presiden AIPA 2011-2012.

Kegiatan hari itu ditutup dengan press conference, dan malam harinya diselenggarakan *solidarity dinner* dengan tuan rumah Dr. Marzuki Alie sebagai Ketua DPR.

Tema sidang umum AIPA ke-33 adalah "*Strengthening the Parliamentary Roles Toward ASEAN Community 2015*". Tema ini diusulkan Indonesia, mengingat DPR memiliki perhatian mendalam mengenai peran dan apa yang bisa parlemen lakukan dalam mewujudkan komitmen regional pembentukan komunitas ASEAN 2015. Didalam forum ini dipandang tepat anggota-anggota parlemen untuk berdiskusi peran masing-masing dan peran lembaga parlemen ASEAN terhadap perkembangan berbagai isu di ASEAN.

Tercatat, hingga 12 September, hadir 347 peserta dari 10 negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, 9 parlemen negara observers, serta 6 tamu tuan rumah. 7 delegasi dipimpin oleh ketua-ketua parlemen, 2 delegasi dipimpin oleh wakil ketua parlemen. Parlemen observer yang hadir yaitu, Australia, Belarus, Kanada, China, Parlemen Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia.

Hadir juga parlemen Timor Leste dan Pan African Parlemen, serta ASEAN Supreme Audit Institution. Pada Sidang Umum ke 33 ini, agenda yang dibahas meliputi beberapa agenda bidang politik, ekonomi, sosial, organisasi, dialog dengan observer, dan woman AIPA.

Di bidang ekonomi, terutama akan dibahas mengenai pengurangan kemiskinan, kerjasama dalam pemberantasan pencucian uang, pemberdayaan UKM dan green ekonomi. Dalam bidang politik akan dilaporkan hasil kehadiran Presiden AIPA dan ketua-ketua parlemen dalam KTT ASEAN di Phnom Penh.

Di bidang sosial, pembahasan berkaitan dengan penanggulangan bencana, peningkatan SDM, dan *Law Carbon*. Di pertemuan WAIPA, isu spesifik mengenai pemberdayaan perempuan di pedesaan.

Indonesia sebagai tuan rumah dalam Sidang Umum AIPA, akan berusaha tampil dengan aktif dan berpartisipasi penuh bagi suksesnya Sidang Umum AIPA ke-33.*

Komite Masalah Politik Sepakati Solusi Terkait Isu Laut China Selatan

Setelah melewati dinamika pembicaraan yang cukup hangat akhirnya Komite Masalah Politik, Sidang Umum ke-33 AIPA berhasil mencapai titik temu terhadap isu Laut China Selatan. Filipina dan Vietnam yang semula ngotot, akhirnya dapat menerima penggunaan kalimat *maintening peace and stability in the region* dalam draf resolusi.



Delegasi AIPA Indonesia Hayono Isman

“Sebelumnya mereka berkeras frasa Laut Cina Selatan harus masuk dalam resolusi, namun alhamdulillah disepakati satu judul yang sifatnya menyeluruh tidak secara spesifik berhubungan langsung dengan South China Sea tapi juga dengan daerah lain yaitu *asean maintening peace and stability in the region*,” kata Hayono Isman, Ketua Komite Masalah Polotik kepada wartawan di Lombok, NTB, Rabu (19/9/12).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini menambahkan sengketa batas di kawasan laut China Selatan harus diselesaikan dengan mekanisme dialog bilateral. Negara yang terlibat yaitu 4 negara Asean, Brunai, Vietnam, Filipina, Malaysia dengan China dan Taiwan harus siap untuk duduk bersama dalam

proses bisa jadi panjang. Ia memberi contoh sengketa batas wilayah Indonesia-Vietnam yang baru tuntas setelah 32 tahun.

“Kita punya semangat *Asean Centrality* yang akan memantau seluruh proses perundingan, apabila dalam pembicaraan bilateral ada satu anggota disakiti tentu anggota lain juga akan merasakan sakitnya. Namun saya gembira parlemen China selaku observer yang diundang datang dalam Sidang Umum AIPA ini telah menegaskan mereka juga memilih jalan damai,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap keputusan yang telah dibuat

Komite Masalah Politik ini dapat disepakati dalam rapat pleno Jumat (21/9) yang akan datang. Ia percaya semangat the *Asean Way* dimana setiap keputusan diambil dengan konsensus dapat terus bergulir. “Kita membangun keputusan dengan konsensus tidak ada voting. Satu negara tidak setuju maka rancangan putusan tersebut batal.”

Hayono menekankan anggota parlemen dari negara-negara anggota Asean yang tergabung dalam AIPA meyakini, cara the *Asean Way* inilah yang akan membuat organisasi mereka semakin kuat dan dihormati oleh negara kawasan lain. (iky)/foto: iwan armanias/parle.



Peta isu mengenai laut china selatan yang di sengkatakan

Penyelenggaraan PON XVII Riau Terganjil Persoalan Hukum

Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR ke PON XVII Tahun 2012 Riau menemukan terdapat persoalan hukum sehingga menghambat pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau .



Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR ke PON XVII Tahun 2012 Riau

“Semestinya spirit yang muncul bukan persoalan hukum, ini menyebabkan delay-nya waktu penyelesaian pembangunan berbagai sarana prasarana PON sebagai akibat persoalan anggaran di daerah itu sendiri,” jelas Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar saat meninjau pelaksanaan PON XVIII Riau baru-baru ini.

Menurutnya pengertian kesiapan seharusnya paling tidak minimal dua bulan sebelum hari H. selain itu, biasanya dilakukan test event untuk mencoba apakah suatu venue betul-betul layak digunakan baik secara teknis maupun materi dan harus diakui oleh federasi olahraga yang bersangkutan “Seharusnya penyelenggaraan suatu event olahraga apapun standarnya ha-

rus internasional,”ujarnya.

Dia menegaskan, PON jangan dianggap tarkam (antar kampung) saja. “Ini adalah justru sebuah media untuk bagaimana melahirkan bibit-bibit baru dan atlet-atlet Internasional,” jelas Dedi.

Politisi PDI Perjuangan ini prihatin terhadap berbagai permasalahan pada penyelenggaraan PON di Riau ini, karena itu yang harus dibenahi bukan hanya persoalan di lapangan dimana secara operasional bahwa Gubernur Riau dan jajarannya tidak berhasil menyelesaikan dengan baik. Akan tetapi, lanjutnya, lebih kepada persoalan yang sangat komprehensif yaitu visi tentang olahraga dan paradigma olahraga kita sendiri.

Dedi melihat penyelenggaraan pekan olahraga di Indonesia baru sebatas yang namanya kegiatan atau sebuah proyek yang harus diselesaikan karena memang ada anggarannya, bukan suatu gerakan yang memiliki spirit dari olahraga itu sendiri.

Dijelaskan Dedi , bahwa suatu daerah yang menyelenggarakan atau menjadi tuan rumah PON, idealnya paling tidak menjadi tiga, lima atau sepuluh besar. “Sebabnya apa, karena daerah yang pernah menjadi tuan rumah PON berarti dia memiliki infrastruktur sarana prasarana olahraga yang lengkap,”ujarnya.

Logikanya, paparnya, suatu daerah harus mampu melahirkan atlet-atlet baru dengan berbagai cabang, akan tetapi justru banyak infrastruktur pasca PON yang tidak terawat hanya karena persoalan dana APBD yang tidak mencukupi untuk pemeliharaan.

Dedi mengingatkan ketika 1930 Almarhum Suratini sebagai pahlawan olahraga, Indonesia membentuk PSSI sebagai bentuk perjuangan. “Walupun hanya satu cabang, itu sudah merupakan gerakan kebangsaan pada saat itu. Bagaimana PSSI saat itu dijadikan alat perjuangan dan perjuangan sebagai alat pemersatu bangsa untuk bersatu agar memiliki kekuatan dan bermartabat,” paparnya.

Terkait PON, Dedi menambahkan di era Soekarno saat PON tahun 1948 pertama dilaksanakan, kemudian sebelum 1962, dan 1963 dibangun perkampungan atlet di Senayan, “Ini merupakan salah satu bentuk visi kebangsaan, visi dimana olahraga bukan hanya sekedar mencari keringat atau sekedar kegiatan yang ada anggarannya, tapi merupakan sebuah gerakan kebangsaan,”ujarnya.(sc) foto;parle

AIPA Serukan Peningkatan Kerjasama Perdagangan Asean-Cina

Delegasi Parlemen Indonesia di Sidang Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mengharapkan kerjasama Cina dengan Asean maupun Indonesia khususnya dapat semakin meningkat diberbagai bidang seperti olahraga, pertanian, pendidikan maupun energi.



Negara peninjau atau Observer China

“Kita mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia termasuk juga di pertanian, energi, dan pendidikan,”kata Delegasi Indonesia Hayono Isman,seusai pertemuan Dialog negara Peninjau (observer) Parlemen Cina dengan anggota AIPA, di Hotel Senggigi, Lombok, NTB, Rabu, (19/9).

Menurut Hayono, di bidang Olahraga, Cina merupakan pusat olahraga karena kita mengharapkan Asean dan Indonesia khususnya dapat belajar dan menimba ilmu dengan Cina.

Khusus energi, Dia menambahkan, Indonesia mengharapkan dapat belajar ke Cina. pasalnya, Cina sudah mulai meninggalkan pertambangan batubara dan menggantinya dengan energi yang ramah lingkungan. “kita ingin belajar dari Cina terutama Indonesia yang memiliki penduduk

terbesar di Asean,khususnya energi nuklir,”katanya.

Dia mengatakan, energi nuklir harus dipertimbangkan untuk jangka panjang dan mencari lokasi yang cocok untuk mengembangkannya. “Misal Kalimantan itu lokasinya bebas dari gunung berapi dan gempa bumi dan dapat dipertimbangkan sebagai lokasi energi nuklir, namun itu bukan dalam waktu dekat tetapi 20 tahun kedepan,”terangnya.

Yang tidak kalah pentingnya yaitu bidang perdagangan, lanjutnya, Saat ini perdagangan Cina dengan kawasan Asean itu tidak seimbang karena itu harus ditingkatkan. “Saat ini kawasan Asean masih defisit dibandingkan dengan Cina karena itu kita mengharapkan kerjasama perdagangan semakin meningkat, juga termasuk Foreign Direct Investment (FDI) Cina ke Asean,”paparnya.



Delegasi AIPA Indonesia Hayono Isman

Terkait teknologi luar angkasa, paparnya, sudah saatnya Indonesia melirik ke Cina dibandingkan dengan negara Barat, Eropa maupun Rusia. “Indonesia juga memiliki potensi untuk peningkatan kerjasama di bidang itu,”tambahnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Dua Usulan Draft Parlemen Indonesia Disetujui Sidang AIPA

Sidang Komite Sosial Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menyetujui 2 (dua) usulan draft yang diusulkan Parlemen Indonesia. Dua draft tersebut adalah Penanganan Bencana dan Teknologi Ramah Lingkungan.



Suasana sidang AIPA Komite Bidang Sosial

Dua agenda tersebut usulan Delegasi Indonesia dan telah disetujui seluruh delegasi dengan perbaikan-perbaikan,” kata Atte Sugandi usai memimpin Sidang Komite Sosial, Rabu (19/9) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Atte menambahkan, agenda pertama yang diusulkan Parlemen Indonesia tersebut ingin mempromosikan partisipasi masyarakat dalam program-program yang berkaitan dengan masalah memperkecil bencana alam dan emergency.

Resolusi ini agar dapat diserukan kepada Negara-negara Asean dan memberikan kontribusi bagi penyelamatan bencana, termasuk manajemennya, dari mulai pertolongan terhadap korban bencana sampai pada adaptasi.

Adaptasi ini dimaksudkan agar masyarakat bisa harmonis dengan lingkungan, terutama untuk daerah yang rawan bencana. Atte memberi contoh, ketika terjadi tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu, masyarakat dibuat kalang kabut, karena masyarakat belum

siap menghadapi bencana dan belum dibekali dengan persiapan jika terjadi bencana.

Untuk itu, kata Atte, agar kepanikan ini tidak terjadi lagi, masyarakat perlu dibekali pendidikan dalam menghadapi bencana alam. Seperti di Negara Jepang yang terkenal dengan Negara yang rawan bencana, masyarakatnya telah siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, karena Pemerintah Jepang memasukkan pendidikan menghadapi bencana alam di sekolah-sekolah.

Kita menyerukan agar Pemerintah memasukkan kurikulum mengatasi bencana ini di sekolah-sekolah. Menurutnya ini penting agar masyarakat dapat melakukan evakuasi sedini mungkin.

Atte menambahkan, seruan ini disampaikan kepada Parlemen Asean yang salah satu fungsinya membuat Undang-Undang, agar bencana itu masuk dalam RUU. Sebagai Anggota Legislatif dari masing-masing Negara Asean mempunyai posisi strategis dalam kebijakan membuat UU.

Sedang draft ke dua yang disetujui adalah Teknologi Ramah Lingkungan. Usulan ini lebih mengarah kepada lingkungan hidup, bagaimana bisa mentransfer dari *low carbon* yang sangat rendah supaya dapat menjaga lingkungan.

Dia menyerukan kepada semua delegasi, agar resolusi yang sudah dibuat harus diimplementasikan di Negara masing-masing. “Ini bentuk komitmen dari masing-masing Negara dalam menangani bencana alam dan lingkungan hidup,” katanya.

Terkait isu lingkungan ini, AIPA juga mengadopsi konvensi dari Bali Road Map tentang lingkungan hidup. Prinsipnya, kita mendukung prinsip penelitian dan pembangunan pada level nasional di seluruh Negara Asean.

Sementara agenda ke tiga, laporan Sidang AIFOKOM yang berlangsung bulan Juli lalu di Yogyakarta, Atte mengatakan kesepakatan Asean menuju 2015 bebas narkoba.

Dalam Sidang tersebut menghasilkan dua draft resolusi yaitu “Role of Parliaments in Drug Demand and Supply Reduction and the Plan of Action to Combat the Drug Menace Consistent with Asean Vision”.

Draft resolusi ini diluncurkan sebagai salah satu upaya dalam memerangi kejahatan narkoba dan mendukung tujuan bersama, yaitu menciptakan kawasan Asean yang bebas narkoba pada tahun 2015.

\Draft resolusi yang ke dua adalah “Establishment of *Technical Working Group* of AIFOKOM”. Berdasarkan draft resolusi tersebut, para anggota AIPA diharuskan untuk membentuk sebuah *Technical Working Group* sebagai forum kerjasama bagi para ahli dan institusi masing-masing Negara anggota AIPA dengan tujuan mengharmonisasi regulasi dan mensinkronisasi aksi bersama dalam memerangi narkoba. (tt)/foto:iwan armanias/parle.

Tim Pengawas DPR Desak KPK Percepat Selesaikan Kasus Century

Tim Pengawas kasus Century mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat penyelesaian kasus Century. Pasalnya masa tugas Tim Pengawas DPR akan berakhir pada akhir tahun 2012 sementara penanganan kasus tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan Tim Pengawas DPR.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Pengawas DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Jakarta Rabu (19/9). Sebelumnya Tim Pengawas DPR juga mengundang mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla meminta masukan soal kasus Century.

Anggota FPD P Hendrawan Supratiknya dan Trimedya Panjaitan mendesak KPK segera menuntaskan kasus Century supaya tidak meninggalkan sejarah bagi generasi yang akan datang. Penjelasan yang disampaikan kali ini kata Hendrawan, persis sama dengan yang disampaikan tiga bulan lalu atau tidak ada kemajuan.

“Saya menangkap ada hambatan, kalau ada hambatan politis tolong KPK ungkapkan, mari kita selesaikan secara politis,” tegasnya. Trimedya Panjaitan menambahkan sampai batas akhir tugas Timwas DPR, waktunya tinggal sekitar satu setengah bulan. Karena itu sebaiknya KPK diundang lagi ke DPR kalau sudah ada kemajuan. “Apakah akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan atau ditutup,” katanya.



Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat memimpin rapat dengar pendapat dengan KPK

Anggota FPG Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsudin juga mendesak KPK segera menuntaskan kasus Century, kesaksian mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang dinilai sudah terang benderang lalu apalagi yang diharapkan KPK. Begitu pula yang disampaikan anggota FPP Ahmad Yani dari FPP

dan Nur Yasin dari FPKB meminta KPK mengutip penjelasan Yusuf Kalla agar KPK lebih fokus pada pejabat BI yang bertanggung dalam kasus tersebut.

Ditegaskan bahwa dua kata kuncinya adalah perpu yang tidak memenuhi syarat karena tidak mendapatkan persetujuan DPR dan pemberian dana talangan (bailout) yang tidak ada dasar hukumnya. “ Karena itu KPK hendaknya fokus kepada para pejabat BI,” tegasnya lagi.

Ketua KPK Abraham Samad mengakui hambatan utama adalah minimnya penyidik. Apalagi belakangan ada 20 orang penyidik yang ditarik oleh Polri makin menghambat tugas-tugas KPK. Dalam kasus Century lanjutnya, KPK masih akan melengkapi penelitiannya dari hasil audit BPK dan 4 orang saksi ahli. “ Karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama KPK akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus Century dalam tahapan yang berbeda,” ujar Abraham Samad. (mp), foto : eka hindra/parle.



Akbar Faisal (kiri) dari Fraksi Hanura menyampaikan pendapat di rapat dengar pendapat dengan KPK

DPR Beri Apresiasi PPK-GBK dan PPKK

Komisi II DPR memberikan apresiasinya terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) atas upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke Negara.



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakan Naja

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja saat RDP dengan Sekretaris Kementerian Sekretarian Negara, jajaran PPK-GBK dan PPKK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/9).

“Namun demikian dalam rangka meningkatkan jumlah PNBP yang harus disetor, Komisi II DPR dan Kementerian Sekneg sepakat untuk melibatkan lembaga independen dalam melakukan pengkajian potensi bisnis yang ada di Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran sekaligus menghitung nilai kelayakan perolehan PNBP yang

akan dijadikan sebagai pegangan bagi PPK-GBK dan PPKK dalam menetapkan target perolehan PNBP,”kata Hakam Naja.

Selanjutnya, Komisi II DPR meminta Kemensekneg agar lebih mengintensifkan koordinasinya dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya sehubungan dengan masalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yakni melalui percepatan atas kepastian status kepemilikan gedung dan bangunan, opsi pengelolaan asset dan bentuk kelembagaannya, kemudian menyampaikannya kepada Komisi II DPR.

Berikutnya, Komisi II DPR meminta Kemensekneg untuk membuat standar dalam pembuatan perjanjian dan renegosiasi untuk BLU PPK-GBK, BLU PPKK dan TMII dengan pihak mitra usaha sehingga memperkuat posisi negara dalam perjanjian yang dibuat, sekaligus memberikan pengamanan yang optimal terhadap asset negara, “Namun dengan catatan, untuk TMII dilakukan setelah selesai prosesnya,”jelasnya.

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi II DPR mendesak kepada PPK-GBK dan PPKK untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi temuan BPMK sesuai dengan hasil pemeriksaan Semester II tahun 2011 yang hingga saat ini masih belum selesai ditindaklanjuti.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR meminta Kemensekneg untuk menyampaikan kepada Komisi II jadwal dan langkah-langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah yang menjadi temuan BPK,”ujar Politisi PAN tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan kawasan eks Taman Ria Senayan, Komisi II DPR meminta agar kawasan tersebut dijadikan kawasan hijau terbuka dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Komplek Gedung DPR, MPR dan DPD RI.

Dalam isi kesimpulan lainnya, Komisi II DPR menugaskan kepada Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR untuk membahas permasalahan yang terkait dengan Aset Negara di kawasan Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran serta TMII secara lebih mendalam dengan Kemensekneg dan melibatkan pihak BPK RI.

Kesimpulan terakhir, Komisi II DPR dan Kemensekneg sepakat untuk melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum dalam rangka mencegah sekaligus melakukan penindakan terhadap permasalahan yang berindikasi pidana dalam pengelolaan asset-aset negara di Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran.(nt) foto:wy/parle

Turki Ingin Tingkatkan Hubungan Bilateral dengan Indonesia

Turki ingin meningkatkan hubungan kerjasama baik bilateral maupun unilateral dengan pemerintah Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Turki sekaligus Ketua Delegasi Volkan Bozkar saat diterima Wakil Ketua DPR RI Anis Matta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9)

Volkan Bozkar mengemukakan bahwa saat ini hubungan diplomasi antar parlemen di dunia sangat kuat. Volkan Bozkar minta

melalui Pimpinan DPR RI agar Turki diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ASEAN, dimana Indonesia menurutnya sebagai God Father dari

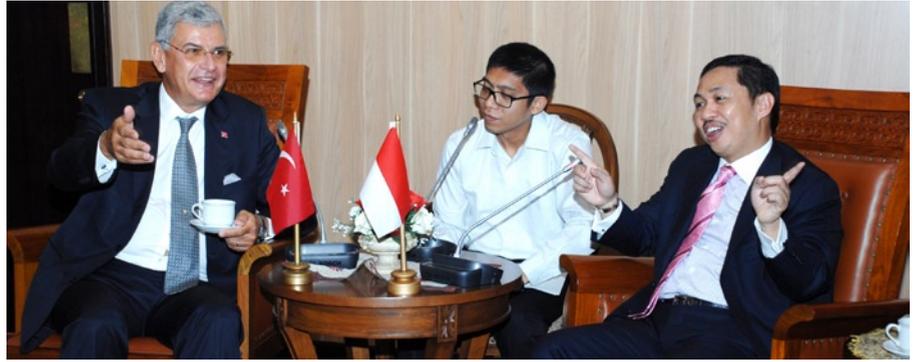
ASEAN. Namun Turki belum bisa bergabung dengan ASEAN karena situasi di Turki belum memungkinkan.

Wakil Ketua DPR RI Anis Matta

menyatakan hubungan Indonesia dan Turki sudah terjalin dengan baik, sejak era Presiden Soeharto dan Presiden Habibie hingga dibentuknya D-8. Menurutnya Turki adalah saudara tua bagi Indonesia.

Dijelaskan Anis, sejak 1998 seperti juga terjadi di Turki, Indonesia mengalami transformasi politik dan ekonomi. Salah satunya terjadi regenerasi di parlemen Indonesia, dimana parlemen Indonesia saat ini sangat aktif dalam membangun hubungan diplomasi dengan berbagai negara.

Dalam kesempatan tersebut Anis juga menyampaikan bahwa Media di



Wakil Ketua DPR RI Anis Matta saat menerima Ketua Delegasi Volkan Bozkar di Gedung DPR RI

Indonesia turut aktif memberikan perhatian terhadap transformasi politik yang terjadi di Turki. "Sekarang Indone-

sia dan Turki menjadi salah satu negara Islam yang moderat," imbuhnya. (sc) foto: wy/parle

Sidang AIPA Dorong Konektivitas Asean 2015

Delegasi Parlemen Indonesia Emil Abeng mengatakan, sidang AIPA ke-33 di Lombok merupakan langkah penting untuk mendorong konektivitas Asean pada tahun 2015 mendatang.

“Pembahasan didalam Komite Ekonomi ini menjadi point penting karena kita bersama-sama menciptakan framework di bidang ekonomi,”ujarnya se usai sidang Komite Ekonomi Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA), di Lombok, NTB, Rabu, (19/9).

Selain itu, berkaitan dengan terbentuknya ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) yang bertanggung jawab mengaudit pendapatan dan pengeluaran pemerintah di negara-negara anggota ASEAN, jelas Emil itu juga sangat erat kaitannya bagaimana berusaha memonitor cross border dan kerjasama memberantas praktek pencucian uang.

Sementara Ketua Komite ekonomi AIPA helmi Fauzy mengatakan, prinsipnya pertemuan ini bertujuan untuk mencapai integrasi Asean, di bidang sosial, budaya dan ekonomi. “Karena itu harus kita cermati jangan sampai Asean sebagai tempat pencucian uang,”ujarnya.

Dia menambahkan, perlu ada peningkatan kerjasama penegakan hukum bersama serta membangun regulasi dan juga kemungkinan menja-

jaki perjanjian estradisi diantara negara Asean lainnya.

Perjanjian Estradisi

Menyinggung perlunya memicarakan kembali perjanjian estradisi Indonesia dengan Singapura, Helmi mengatakan, perjanjian estradisi selalu dikaitkan dengan persoalan kerjasama keamanan antar kedua negara, padahal ini merupakan persoalan yang terpisah dengan kerjasama keamanan. “Memang sampai sekarang belum ada perjanjian estradisi antar kedua negara,”paparnya.

Dia mengharapkan, resolusi soal pencucian uang dapat membuka pintu dilanjutkannya kembali pembicaraan perjanjian estradisi antar kedua negara. “Mudah-mudahan resolusi ini dapat ditingkatkan kerjasama yang lebih luas dalam rangka memerangi praktek pencucian uang dan dapat menjadi basis negara Asean lainnya untuk meminta estradisi,”paparnya.

Dia menambahkan, langkah ini merupakan niat baik seluruh negara Asean dalam memerangi praktek pencucian uang. “Kita diharapkan dapat diterapkan didalam regulasi ma-

sing-masing negara,”ujarnya.

Menurutnya, parlemen Singapura sangat mendukung sekali dalam upaya memberantas kejahatan trans nasional dan money laundry ini.

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia dan Singapura pernah membahas perjanjian ini. Namun, pembahasan terhenti akibat situasi yang memanas di Indonesia dan Singapura. Isi perjanjian estradisi membicarakan kerja sama di bidang penindakan hukum, pencarian koruptor, dan pengembalian aset negara yang dibawa oleh koruptor. (si)/foto:iwan armanias/parle.



Delegasi AIPA Indonesia Emil Abeng

Resolusi AIPA Pemberantasan Pencucian Uang Disetujui

Seluruh delegasi Komite Ekonomi AIPA menyepakati penguatan kerjasama di tingkat regional dalam rangka memberantas praktek pencucian uang di kawasan Asean



Ketua Sidang Komite Ekonomi AIPA Helmi Fauzy saat diwawancarai oleh para wartawan

Demikian salah satu butir kesepakatan pembahasan Komite Ekonomi Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dalam sidang Umum AIPA ke 33 di NTB, Lombok, Rabu, (19/9).

Menurut Ketua Sidang Komite Ekonomi AIPA Helmi Fauzy, didalam Sidang tersebut sempat dibicarakan mengenai kemungkinan kerjasama estradisi antar negara parlemen Asean.

“Seluruh negara parlemen di Asean sepakat untuk meningkatkan kerjasama bahkan termasuk juga membicarakan estradisi dalam upaya memberantas kejahatan trans nasional. karena praktek pencucian uang menjadi basis kejahatan lainnya termasuk human trafficking, jadi betul-betul akan dipegangi oleh negara Asean,”ujarnya.

Dia mengatakan, pembahasan di komite ekonomi tidak ada ada perdebatan yang alot cuma persoalan tata bahasa saja dengan negara parlemen lainnya. “Misalnya saja ketika membahas UMKM, ada yang menekankan

UMKM sebagai backbone, maupun main engine,”ujarnya.

Terkait pembahasan itu, lanjutnya, Singapura yang sudah maju tersebutpun senada dengan delegasi lainnya, bahkan UKM juga dianggap menjadi backbone ekonomi singapura karena menampung sebagian besar tenaga kerja di negaranya.

Pada kesempatan itu, Parlemen Asean juga menyepakati bahwa UKM merupakan sokoguru aktivitas ekonomi yang berpihak pada upaya mengurangi angka pkemiskinan di kawasan Asean. “Ini merupakan Usulan Indonesia semuanya dan itu mendapat applaus dan dapat diadopsi segera pada sidang umum terakhir,”paparnya.

Terdapat empat isu utama yang disetujui didalam Komite Ekonomi AIPA, pertama yaitu adanya peningkatan kerjasama tingkat regional untuk melawan praktek pencucian uang. “kita akan memberikan penguatan sehingga AIPA dapat sungguh--sungguh

memerangi ini sebagai basis kejahatan trans internasional,”tambahnya.

Berikutnya yaitu resolusi untuk mendukung ekonomi yang ramah lingkungan, serta penguatan regulasi dan keberpihakan Asean dalam meningkatkan ekonomi yang ramah lingkungan, ketiga yaitu strategi dalam kerangka membangun kelembagaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan di kawasan Asean.

Terakhir, lanjut Helmi, yaitu resolusi mengenai penguatan UKM di kawasan Asean. artinya, harus ada peningkatan komitmen Asean agar UKM dapat menjadi penggerak ekonomi di kawasan Asean ini. “kita juga mengharapkan adanya upaya atau komitmen untuk mengeluarkan regulasi dan anggaran yang berpihak terhadap UKM. jadi UKM itu prioritas bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah Asean,”tambahnya.(si)/foto: iwan armanias/parle.

Delegasi AIPA Adakan Pertemuan Dengan Parlemen Negara Observer

Delegasi Anggota Parlemen Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mengadakan pertemuan dengan Parlemen Negara Observer, yakni Australia, Canada, China, Eropa, India, Jepang, Korea, Belarus dan Rusia.

Dalam pertemuan dengan Parlemen Negara Observer dari Jepang, Rabu (19/9) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anggota Delegasi Indonesia Atte Sugandi mengatakan dialog dengan para Negara peninjau merupakan program regular yang diadakan di dalam rangkaian acara Sidang Umum AIPA.

Dialog ini, kata Atte, berfungsi sebagai forum bagi para anggota parlemen AIPA untuk bertemu dan berdiskusi dengan anggota parlemen dari Negara-negara peninjau untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama dan mempererat kerjasama dengan Negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Asean.

Atte menambahkan, hubungan Asean dan Jepang telah berlangsung sejak tahun 1973. Saat itu, katanya, Asean dan Jepang memulai hubungan dialog secara informal yang kemudian ditindak lanjuti secara formal dalam Asean-Japan forum 1977.

Ini menunjukkan bahwa peran Jepang dalam hubungan luar negeri Asean sangat penting. Asean dan Jepang juga tergabung dalam forum kerja sama Asean+3 sejak 1997.

Lebih jauh Atte mengatakan, kemitraan Asean dan Jepang terjalin dalam berbagai kerangka kerja sama komprehensif. Pada Asean Japan Summit ke-14 di Bali, November tahun lalu, telah diadopsi *Joint Declaration for Enhancing Asean-Japan Strategic Partnership for Prospering Together dan Asean-Japan Plan of Action 2011-2015*.

Di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, Jepang merupakan mitra perdagangan terbesar ke tiga Asean dengan share 10% dari total perdagangan, sementara Asean meru-



Delegasi AIPA Indonesia Komite Bidang Sosial Atte sugandi

pakan mitra perdagangan terbesar ke dua bagi Jepang.

Jepang, kata Atte, juga investor penting bagi Asean dengan total share mencapai kurang lebih 11% dari total investasi. "Ini menunjukkan pentingnya peran Jepang bagi pertumbuhan dan kemakmuran Asean dan sebaliknya," kata Atte saat memimpin pertemuan dengan parlemen Negara Observer dari Jepang ini.

Atte mengatakan, ada lima agenda topik yang akan dibahas dengan parlemen negara observer, yakni memperkuat pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas, mempromosikan kerjasama penelitian dan transfer strategi dalam prosedur pertanian, makanan dan kehutanan, energi dan isu aspek lingkungan, memperkuat upaya untuk mengatasi kebu-

tuhan adaptasi perubahan iklim dan meningkatkan kerjasama antara anggota parlemen AIPA dan pengamat.

Dalam kesempatan tersebut berbagai hal ditanyakan delegasi anggota Parlemen AIPA, diantaranya adalah kebutuhan energi Jepang pasca tsunami, kerjasama pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam kebijakan *Social-Cultural Cooperation*.

Delegasi Parlemen Indonesia berharap kerjasama antar-parlemen termasuk antara Indonesia dan Jepang dilakukan dalam bingkai penguatan peran parlemen sebagai pilar politik.

Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah dan landasan formal dalam menentukan format-format kerja sama antara Parlemen Jepang dan Parlemen Indonesia ke depan. (tt)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi III DPR Harapkan Masalah Penarikan Penyidik Polri Diselesaikan

Kalangan Komisi III DPR meminta masalah penarikan 20 orang penyidik Polri dari KPK segera diselesaikan. Ketiga lembaga penegak hukum Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya meninggalkan ego sektoral, harus bersatu padu memberantas korupsi.



Jajaran Anggota Komisi III DPR RI



Jajaran Polri, Kejaksaan Agung dan KPK

“Komisi III mengundang Kejaksaan, Kapolri dan Pimpinan KPK dengan niat baik, memfasilitasi pertemuan sehingga ketiga lembaga penegak hukum tersebut bisa makin kompak memerangi korupsi,” tandas anggota Komisi III Ahmad Yani dan Edi Ramli Sitanggang dalam raker yang dipimpin Wakil ketua Komisi Tjatur Sapto Edy di Gedung DPR Senayan, Senin (17/9) siang.

Dalam raker gabungan yang bertajuk “Pola Koordinasi dan Sinergi Dalam Pemberantasan Korupsi” ketiga lembaga penegak hukum tersebut menyampaikan paparannya mengenai langkah-langkah yang dilakukan khususnya dalam pemberantasan korupsi. Namun dari jawaban yang disampaikan, koordinasi dan supervisi yang dilakukan telah berjalan dengan baik.

Penjelasan tersebut langsung mendapat tanggapan sejumlah anggota diantaranya Desmond Junaidi

Mahesa, kalau jawabannya seperti ini rapat ini tidak perlu dilanjutkan. Anggota lainnya Deding Ishak, Nudirman Mudir dan Ketua Komisi I Gede Suardika meminta masalah yang muncul sehubungan penarikan 20 penyidik Polri dari KPK jangan ditutup-tutupi. “Forum raker gabungan ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Deding Ishak.

I Gede Suardika mengatakan, dalam raker ini dibahas hal-hal yang fundamental dan dampaknya sangat luas. Kalau dikatakan tidak ada masalah, okelah. Tapi berita yang berkembang sangat ramai soal penarikan penyidik Polri dari KPK berarti ada masalah. “Mari kita selesaikan masalah yang penting dulu apalagi raker gabungan sudah dijadwal sejak lama dan mempertemukan ketiga institusi penegak hukum ini susah, sementara DPR sendiri terikat dengan masa sidang,” tukasnya.

Suasana rapat berkembang agak

memanas menyusul interupsi yang disampaikan beberapa anggota DPR, namun Ketua Sidang akhirnya mengetuk palu untuk skors, dilanjutkan sesuai istirahat siang.

Dalam paparannya Kapolri Timur Pradopo mengatakan, capaian pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi saat ini masih belum maksimal. Masih bersifat sektoral, kurang koordinasi dan sinergi baik di lingkungan lembaga-lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif di pusat maupun daerah.

Sedangkan Jaksa Agung Barief Arief mengatakan, dalam prakteknya potensi munculnya rivalitas dalam pemberantasan korupsi selalu ada di setiap lembaga hukum. Untuk mengantisipasinya maka diperlukan kerjasama dari berbagai komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Lebih-lebih lagi antara lembaga penegak hukum mutlak diperlukan kerjasama untuk efektifnya penegak hukum. (mp): foto:parle.

Delegasi Indonesia Kecam Produser Film Innocence of Muslims

Saat menyampaikan Statement di depan Sidang Pleno pertama Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Delegasi Indonesia mengecam keras tindakan tidak terpuji yang dilakukan produser film “innocence of Muslims”.



Delegasi AIPA Indonesia atau Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

Dalam statement yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Selasa (18/9) di Lombok, dia mengatakan beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan porak porandanya instabilitas keamanan di beberapa obyek diplomatik vital di kawasan Timur Tengah yang disulut oleh sebuah film provokatif bertema “innocence of Muslims”.

Lautan demonstrasi pun tumpah di jalan utama kota-kota Timur Tengah memprotes pelecehan dan penghinaan terhadap Islam yang mengatasnamakan *Freedom of speech*.

Namun dia menyerukan agar demonstrasi yang juga terjadi di beberapa Negara-negara Asean dapat berjalan damai tanpa harus berujung dengan kekerasan sesuai dengan nilai-nilai perdamaian dan harmoni Asean yang selama ini terbangun kokoh.

Pada kesempatan tersebut, Priyo juga menyoroti merebaknya kejahatan pencucian uang yang marak terjadi akhir-akhir ini. Menurut Priyo, sistem moneter dan perbankan yang semakin modern ternyata menyisakan

celah bagi lahirnya praktik-praktik tidak terpuji.

Kejahatan pencucian uang telah menggerus ekonomi Negara-negara Asean. Oleh sebab itu, Delegasi Indonesia menghimbau Parlemen-parlemen Anggota AIPA untuk mengasah fungsi legislasi di dalam menyulam rezim anti pencucian uang di masing-masing negara.

Selain itu, institusi penegak hukum dan pengadilan juga perlu diperkokoh untuk menopang kerjasama bilateral melalui implementasi perjanjian ekstradisi maupun mutual legal assistance. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-negara Asean juga harus menjadi arsitek peraturan dan pengawasan yang dapat menangkal kejahatan kerah putih.

“Kita harus dapat menutup celah bagi praktik yang berpotensi mengoyak-koyak pondasi ekonomi kawasan ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Priyo mengatakan, Anggota AIPA memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat dan menjadi ujung tombak pendo-

rong terbentuknya Komunitas Asean 2015.

Sejak empat dasawarsa yang lalu, AIPA selalu berdiri tegak di garda terdepan sebagai mitra konstruktif Asean dalam meretas kawasan Asia Tenggara yang lebih damai dan sejahtera. Konsistensi peran dan upaya AIPA ini akan terus membahana dan melaju kencang di tengah gelombang tantang kerjasama regional.

Pada sidang kali ini, kata Priyo, kita tertantang untuk mengolah-usahakan solusi atas berbagai permasalahan dari implementasi ekonomi hijau, pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi kesenjangan pembangunan, penanganan bencana alam hingga peningkatan peran Anggota Parlemen Perempuan dalam membangun Asia Tenggara.

Priyo berharap, Sidang Umum AIPA Ke-33 di Pulau Lombok ini menjadi mata air yang memberi solusi sejuk bagi kompleksitas masalah yang silih berganti hadir di kawasan Asia Tenggara. (tt)/foto:iwan armanias/parle.

Pemerintah Harus Segera Blokir Film Yang Mencederakan Umat Islam

Komisi I DPR RI meminta Pemerintah harus tegas dan cepat memblokir akses terhadap film yang mencederakan umat Islam, dalam rangka menutup dan melarang peredaran film itu masuk di Indonesia.



Suasana Komisi I menerima delegasi Parlemen Turki, di Gedung DPR RI

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, mengapresiasi sikap Pemerintah RI yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, walaupun dia menilai terlambat. “Mestinya sejak awal Pemerintah Indonesia bisa merespon persoalan ini, sehingga bisa diantisipasi gelombang reaksi yang bisa semakin luas dan cenderung bisa saja terjadi bentrok fisik,” katanya sebelum Komisi I menerima delegasi Parlemen Turki, di Gedung DPR RI, Selasa (17/9).

Dia mengatakan, yang penting sekarang ini Pemerintah khususnya aparat kepolisian jangan bergeser pada persoalan bagaimana menangani aksi-aksi protes tersebut, tetapi fokus pada akar masalah. “Akar masalahnya beredarnya film yang jelas-jelas melecehkan umat Islam, ini seperti nya dibiarkan Pemerintah Amerika,” tegasnya.

Menurut Mahfudz Siddiq, satu hal

yang belum disampaikan oleh Pemerintah lewat SBY kemarin, meminta kepada Pemerintah Amerika untuk menghentikan peredaran film itu. “Itu harusnya juga secara tegas, walaupun

mereka akan berkilah atas nama kebebasan, berpendapat, berekspresi. Tetapi menurut saya ini sudah anti demokrasi,” jelasnya.

Mahfudz menegaskan yang harus dibuka ke mata dunia adalah bahwa Amerika yang selalu bicara masalah demokrasi, HAM, pluralisme, kenyataannya selalu bertolak belakang.” Bahkan Menlu Hillary Clinton juga menegaskan bahwa kita tidak boleh membiarkan pelanggaran dan pelecehan terhadap agama, namun film ini sesungguhnya telah mencederai pemerintah Amerika atas nama kebebasan demokrasi yang dikampanyekan,” tukas politisi PKS ini.

Ditegaskan pula, kalau Pemerintah Amerika tetap berpandangan seperti ini maka sesungguhnya Amerikalah yang sedang memupuk api-api konflik, bukan saja konflik politik dan sosial tetapi juga konflik ideologis. (as)foto: wy/parle



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

Komisi IX DPR RI Soroti Pelaksanaan Jamkesmas

Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti berbagai persoalan yang terjadi pada pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9)



Suasana rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Gedung DPR RI

Arif Minardi (F-PKS) saat diberi kesempatan pertama bertanyanya oleh Pimpinan Rapat Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, meminta komitmen Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam pelaksanaan program Jamkesmas.

“Selain masih banyak farkir miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas dan Jamkesda, tagihan biaya rumah sakit banyak yang belum terbayar oleh pemerintah daerah karena kesulitan dana,” ujar Arif.

Anita Jacoba (F-PD) mempertanyakan kebijakan Kementerian Kesehatan mengenai pengadaan obat formularium bagi masyarakat miskin. Menurutnya anggaran untuk obat formularium ada, namun obat tersebut tidak pernah ada di rumah sakit.

“Tidak tersedianya obat formularium di rumah sakit akhirnya mengakibatkan dokter membuatkan resep obat di luar formularium dan akhirnya pasien miskin diharuskan membeli obat, bahkan kadang dokter mengancam apabila tidak membeli obat

tersebut di apotik tertentu bahwa pasien akan meninggal dunia. Keluarga pasien miskin menghadapi hal demikian selalu ketakutan akhirnya dengan berbagai cara membeli obat tersebut,” papar Anita.

Menurutnya hal tersebut sering terjadi di lapangan padahal anggaran untuk pengadaan obat tersebut ada. Sementara jika dirinya bertanya pada Menteri Kesehatan selalu dijawab bahwa obat formularium itu bukan urusan Kementerian Kesehatan tapi menjadi urusan rumah sakit.

Endang Agustini Syarwan Hamid (F-PG) meminta Kementerian Kesehatan membuat standar baku pelayanan kesehatan dalam persiapan menuju pelaksanaan BPJS. Dirinya menilai pelayanan terburuk berada di Puskesmas sebagai lini terdepan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Sementara Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) menyatakan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas bukan persoalan besar kecilnya anggaran bagi penerima bantuan iuran.

Menurutnya yang sekarang terjadi



Arif Minardi Anggota Komisi IX DPR RI

adalah persoalan tentang mekanisme rujukan, persoalan system yang macet, persoalan pendataan, persoalan verifikasi yang macet dan sangat birokratif.

“Yang dihadapi bukan persoalan teknis pemasaran tapi ini persoalan orang sakit. Ketika orang datang ke rumah sakit kemudian dia harus ada rujukan dulu ke puskesmas, sedangkan dokter puskesmasnya harus dicari dulu. Berapa kasus yang terjadi seperti ini,” jelas Rieke.

“Oleh karena itu kita harus punya kesepakatan bersama bahwa persoalan anggaran dalam BPJS itu penting, tetapi persoalan membangun system, mekanisme dan asilitas harus menjadi prioritas,” imbuhnya. (sc)foto:wy/parle

Segera Selesaikan Kasus Century Secara Hukum

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengharapkan kasus Century jangan sampai memberi dampak yang terlalu panjang pada bangsa ini dan hendaknya menjadi pembelajaran jangan sampai terulang kembali. Karena itu harus segera diselesaikan secara hukum sehingga ada kepastian bagi bangsa ini termasuk DPR dan pemerintah, jangan terpecah belah.



Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

“Yang penting adalah kebenaran untuk kemaslahatan bangsa, jangan terulang kasus-kasus seperti ini sehingga menghambat kemajuan bangsa ke depan,” tandas Kalla saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas Century DPR di Jakarta, Rabu (19/9). Tim DPR selain mengundang JK juga menghadirkan Pimpinan KPK untuk melengkapi bahan-bahan sebagai laporan Tim yang akan berakhir tugasnya pada Desember 2012 mendatang.

Dalam acara ini sejumlah anggota menyampaikan pertanyaan sebagai pendalaman materi setelah JK menyampaikan paparannya. Mengutip penjelasan Yusuf Kalla, anggota FPP Ahmad Yani mengatakan, dalam kasus Century ada dua kata kunci yaitu Perpu No. 4/2008 yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh perpu,

dan masalah bank guarantee yang tidak ada dasar hukum karena tidak pernah mendapatkan pengesahan baik oleh Wapes atau Presiden.

Jadi lanjutnya, ini sudah nampak terang benderang, karena itu dari dua hal ini siapa yang harus bertanggung jawab. Keterangan Pak JK simpel, harus ada orang yang bertanggung jawab, masak Bank asing yang bangkrut negara yang harus bertanggung jawab. “Saya setuju dengan Pak JK bahwa sumber masalahnya ada di BI,” tukas Ahmad Yani.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, anggota FPG Bambang Susatyo penjelasan Pak JK sudah cukup bagi KPK untuk meningkatkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Ia membandingkan ke-

saksian Agus Condro dalam kasus cek pelawat yang melibatkan Miranda S. Goeltom mampu menyeret sejumlah anggota DPR masuk penjara.

“Masak kesaksian mantan Wapres JK tidak mampu mengungkap pejabat pemerintah yang diduga terlibat kasus tersebut,” katanya dengan menambahkan dari penjelasan JK terungkap mantan Wapres itu tidak mengetahui adanya “operasi senyap” yang menggelontorkan dana 6,7 T untuk memberi dana talangan kepada bank kecil.

Atas penjelasan mantan Wapres tersebut sejumlah anggota mendesak agar kasus Century bisa segera diselesaikan dan hasil rapat-rapat termasuk dengan JK ini bisa diserahkan rekamannya secara lengkap kepada KPK. (mp), foto : eka hindra/parle.



Suasana rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas Century DPR RI

Resolusi WAIPA Dorong Pemberdayaan Perempuan

Resolusi yang dihasilkan dalam Women Parliamentarian of AIPA (WAIPA) sangat erat kaitannya dalam peningkatan pemberdayaan perempuan di kawasan Asean karena itu harus diimplementasikan kepada rakyat dan konstituen di tiap anggota parlemen Asean.



Delegasi WAIPA Indonesia Okky Asokawati (kiri)

“Kita mengharapkan ini jangan berupa resolusi saja tetapi dapat diimplementasikan kepada konstituen dan produk legislasi di tiap negara kawasan Asean,” ujar anggota DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawati kepada parlementaria, di Mataram, NTB, Senin, (17/9).

Menurut Okky, didalam draft resolusi itu menyebutkan adanya keterlibatan perempuan untuk dilatih dan di fasilitasi agar mengenal politik lebih dini. “Ini sudah saya lakukan setiap reses dengan melibatkan perempuan serta mengadakan debat ilmiah untuk siswa SMA kelas dua dan tiga, tetapi khusus perempuan saja,” paparnya.

Dia menambahkan, hal itu dilakukan karena berdasarkan pengalaman pri-badinya dia sangat telat menge-

nal dunia politik. “Saya mengenal politik telat yaitu saat usia saya 49 tahun dan sama sekali tidak memiliki background organisasi politik sebelumnya,” paparnya.

Dia mengatakan, dirinya memiliki visi dan misi untuk membangun kapasitas perempuan, sehingga diharapkan apabila anak muda sudah terbiasa membahas persoalan kenegaraan tentunya mereka akan terbiasa dengan dunia politik

Terkait legislasi yang pro perempuan, Okky mengatakan, legislasi kita sudah mulai pro terhadap kaum perempuan, misanya saja didalam UU kesehatan No.36 tahun 2009 sudah memberikan perhatiannya bagi kaum perempuan terkait persoalan aborsi namun dengan syarat dapat dilakukan

apabila membahayakan keselamatan ibu dan anak.

Kemudian UU pemilu mengenai keterwakilan 30 persen telah menunjukkan perhatiannya terhadap perempuan, sementara didalam RUU pengganti UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri,

DPR menekankan kepada perlindungan bagi TKI maupun TKWnya saat bekerja di luar negeri, dimana sebelumnya di dalam UU no.39 tahun 2004 yang lama, aspek perlindungan TKI masih minim. “Ini DPR tengah merevisinya, artinya sama saja kita tengah memberikan perlindungan bagi kaum perempuan,” paparnya.

Persoalan yang dihadapi oleh Asean, lanjut Okky, masih seputar persoalan kultural yaitu masih besarnya budaya patrikal. sehingga belum adanya role model kaum perempuan di dunia politik. “Karena itu kita harapkan dengan pertemuan ini dapat tercipta konsensi dan sharing pengalaman di Asean agar perempuan dapat semakin berani tampil di dunia politik,” tambahnya.

Menurutnya cara pandang pria dan wanita berbeda artinya ini menjadi tantangan perempuan untuk mengambil posisi *decision maker* tanpa adanya intimidasi terhadap pria. “Ini jangan dilihat dan disandingkan *head to head* begitu jadi kita bisa saling mengisi. harus ada persatuan suster dan brotherhood untuk membangun kesejahteraan negara,” paparnya.

Guna meningkatkan partisipasi perempuan, lanjutnya, perlu diperbaiki rekrutmen internal Parpol dengan lebih memperhatikan kaum perempuan. “Memang penambahan keterwakilan di DPR harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan perempuan,” kata Wakil Rakyat dari DKI Jakarta II ini. (si) foto:parle



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo menari bersama seusai menerima masyarakat Papua Selatan Rabu (18/9) Foto: Wahyu/parle



Jusuf Kalla didampingi Chairuman Harahap memberikan keterangan Pers seusai rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas Century DPR RI Rabu (18/09), Foto : Eka Hindra/Parle



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
 Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id